



## Evaluasi Pelaporan Keberlanjutan Berbasis Standar Global

### *Evaluation of Global Standards-Based Sustainability Reporting*

Kevin Jeremi Doniartha Saragih<sup>1</sup>, Nasirwan<sup>2</sup>

Universitas Negeri Medan

E-mail: [alucardsaragih@gmail.com](mailto:alucardsaragih@gmail.com)<sup>1</sup>, [nasirwan@unimed.ac.id](mailto:nasirwan@unimed.ac.id)<sup>2</sup>

---

#### Article Article Info

#### Article history :

Received : 11-06-2026

Revised : 13-06-2026

Accepted : 15-06-2026

Pulished : 17-06-2026

#### Abstract

*This research aims to evaluate sustainability reporting practices in public companies based on Global Reporting Initiative (GRI) standards. The research uses a qualitative descriptive approach with content analysis procedures for sustainability reports published by companies. Analysis is carried out by aligning the level of disclosure of economic, regional and social aspects with the markers established in the GRI standards. The research results show that most industries have adopted sustainability reporting, but the level of appropriateness of disclosure still varies. Economic aspects tend to be disclosed more fully than environmental and social aspects. In addition, several important indicators are still not reported consistently, thereby reducing the level of transparency and comparability of information. These findings show that the implementation of GRI standards is still partial and requires an increase in the quality of disclosure so that sustainability reports can provide more comprehensive data for stakeholders.*

**Keywords:** *Sustainability reporting, Global standards*

---

#### Abstrak

Riset ini bertujuan buat mengevaluasi praktik pelaporan keberlanjutan pada perusahaan publik berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI). Riset memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan tata cara content analysis terhadap laporan keberlanjutan yang diterbitkan perusahaan. Analisis dicoba dengan menyamakan tingkatan pengungkapan aspek ekonomi, area, serta sosial dengan penanda yang diresmikan dalam standar GRI. Hasil riset menampilkan kalau sebagian besar industri sudah mengadopsi pelaporan keberlanjutan, tetapi tingkatan kesesuaian pengungkapan masih bervariasi. Aspek ekonomi cenderung diungkapkan lebih lengkap dibandingkan aspek lingkungan dan sosial. Selain itu, beberapa indikator penting masih belum dilaporkan secara konsisten sehingga mengurangi tingkat transparansi dan keterbandingan informasi. Penemuan ini menampilkan kalau implementasi standar GRI masih bertabiat parsial serta membutuhkan kenaikan mutu pengungkapan supaya laporan keberlanjutan bisa membagikan data yang lebih komprehensif untuk pemangku kepentingan.

**Kata kunci:** Pelaporan keberlanjutan, Standar global

#### PENDAHULUAN

Pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) semakin sering diperhatikan praktik bisnis modern seiring meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab perusahaan atas dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasionalnya. Perusahaan tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit*), tetapi juga dituntut untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan kelestarian



lingkungan (*planet*) sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaporan keberlanjutan menjadi media penting bagi perusahaan untuk mengomunikasikan kinerja dan komitmennya kepada para pemangku kepentingan.

Konsep pelaporan keberlanjutan sejalan dengan *Triple Bottom Line Theory* yang dikemukakan oleh Elkington (1997), yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984) menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan, sedangkan *Legitimacy Theory* (Deegan, 2002) menjelaskan bahwa perusahaan berupaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengungkapan informasi yang transparan dan sesuai dengan nilai serta harapan sosial.

Dalam perspektif akuntansi, akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan aktivitas kepada pihak yang berhak memperoleh informasi, sedangkan transparansi merupakan keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang material, akurat, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan (Nasirwan et al., 2016). Dengan demikian, pelaporan keberlanjutan dapat dipandang sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi perusahaan untuk menunjukkan informasi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Dari perspektif Islam, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai pertanggungjawaban kepada sesama manusia, tetapi juga sebagai pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Islam mengajarkan prinsip *amanah*, kejujuran (*shiddiq*), dan keadilan dalam penyampaian informasi. Nasirwan et al. (2016) menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus dilandasi oleh nilai amanah dan keterbukaan informasi kepada pihak yang berhak menerimanya. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 58 tentang kewajiban menyampaikan amanah secara adil dan QS. Al-A'raf ayat 56 tentang larangan melakukan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, pelaporan keberlanjutan bukan tanggung jawab saja ekonomi dan sosial, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin kualitas dan keterbandingan informasi keberlanjutan, berbagai standar global telah dikembangkan, salah satunya adalah *Global Reporting Initiative (GRI) Standards*. Standar ini menyediakan pedoman sistematis bagi perusahaan dalam mengukur dan melaporkan kinerja keberlanjutan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sehingga laporan yang dihasilkan menjadi lebih relevan, transparan, dan andal.

Meskipun berbagai pedoman pelaporan keberlanjutan telah tersedia, implementasinya pada perusahaan publik masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Beberapa perusahaan mengadopsi standar global secara komprehensif, sedangkan sebagian lainnya masih melakukan pengungkapan secara terbatas dan belum sesuai dengan seluruh indikator GRI. Kondisi tersebut perbedaan antara standar yang tersedia dan praktik pelaporan yang dilakukan perusahaan. Maka riset ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik pelaporan keberlanjutan pada perusahaan publik berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI) Standards* guna mengetahui tingkat kesesuaian pengungkapan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial serta mendorong terciptanya laporan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.



## TINJAUAN PUSTAKA

Pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) merupakan proses pengungkapan informasi mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan kepada yang punya kepentingan. Pelaporan keberlanjutan bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan sehingga para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan berusaha mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Laporan keberlanjutan juga menjadi sarana bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dampak aktivitas operasionalnya terhadap masyarakat dan lingkungan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang berorientasi jangka panjang.

Konsep pelaporan keberlanjutan tidak terlepas dari Triple Bottom Line Theory yang dikemukakan oleh Elkington (1997), yang menjelaskan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan keuntungan (profit), tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat (people) dan lingkungan (planet). Selain itu, Stakeholder Theory yang dikemukakan oleh Freeman (1984) menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan, seperti investor, kreditur, karyawan, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat. Sejalan dengan teori tersebut, Legitimacy Theory (Deegan, 2002) menjelaskan bahwa perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat melalui pengungkapan informasi yang transparan dan nyata dan yang berlaku.

Untuk menjamin kualitas dan keterbandingan informasi yang diungkapkan, berbagai standar pelaporan keberlanjutan telah dikembangkan, salah satunya adalah Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Standar ini merupakan pedoman internasional yang digunakan perusahaan dalam mengukur dan melaporkan kinerja keberlanjutan pada aspek ekonomi (GRI 200), lingkungan (GRI 300), dan sosial (GRI 400). Penerapan GRI Standards diharapkan mampu meningkatkan kualitas, relevansi, dan kredibilitas informasi keberlanjutan sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi para yang punya kepentingan dan mendukung terciptanya perusahaan yang bagus.

Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, prinsip akuntabilitas dan transparansi memiliki peranan yang sangat penting. Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan aktivitas kepada pihak yang berhak memperoleh informasi, sedangkan transparansi merupakan keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang material, akurat, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan (Nasirwan et al., 2016). Oleh karena itu, pelaporan keberlanjutan dapat dipandang sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi untuk menunjukkan informasi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terbuka dan bertanggung jawab. Penerapan kedua prinsip tersebut dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan serta memperkuat legitimasi perusahaan di mata masyarakat.

Dari perspektif Kristen, pelaporan keberlanjutan dapat dipahami melalui Stewardship Theory (Teori Penatalayanan) yang menekankan bahwa manusia merupakan pengelola (steward) atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan bukan pemilik mutlak atas sumber daya tersebut. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi dan bisnis harus dijalankan secara bertanggung jawab, jujur, dan bijaksana dengan memperhatikan kesejahteraan manusia serta kelestarian



lingkungan. Konsep penatalayanan mengajarkan bahwa pengelolaan sumber daya dan dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Dengan demikian, pelaporan keberlanjutan tidak hanya menjadi sarana komunikasi perusahaan kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab etis dalam mengelola sumber daya dan dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi praktik pelaporan keberlanjutan pada perusahaan publik berdasarkan standar global. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis isi laporan keberlanjutan yang dipublikasikan perusahaan untuk menilai tingkat kesesuaian pengungkapan informasi dengan indikator yang ditetapkan dalam Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Evaluasi dilakukan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang merupakan komponen penting untuk pelaporan keberlanjutan.

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai praktik pelaporan keberlanjutan yang dilakukan perusahaan, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan berdasarkan standar yang berlaku.

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah perusahaan publik yang menerbitkan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Fokus penelitian diarahkan pada pengungkapan informasi keberlanjutan yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagaimana diatur dalam GRI Standards.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini memakai data sekunder dari laporan keberlanjutan (sustainability report), laporan tahunan (annual report), serta dokumen pendukung lainnya yang dipublikasikan secara resmi oleh perusahaan. Data tersebut dipilih karena memuat informasi yang relevan mengenai praktik pelaporan keberlanjutan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian dengan standar global.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah laporan keberlanjutan serta dokumen terkait yang tersedia secara publik. Selanjutnya, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sesuai dengan indikator yang terdapat dalam GRI Standards.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menggunakan metode content analysis (analisis isi). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan membandingkan informasi yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan dengan indikator yang direkomendasikan dalam GRI Standards. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk menilai tingkat kesesuaian pelaporan



keberlanjutan yang dilakukan perusahaan. Melalui metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pengungkapan informasi keberlanjutan serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan dalam penerapan standar global.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelaporan keberlanjutan pada perusahaan publik sudah mengalami perkembangan yang bagus. Sebagian besar perusahaan telah memunculkan laporan yang berkelanjutan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Namun tingkat kesesuaian pengungkapan masih menunjukkan variasi pada setiap aspek yang diatur dalam Global Reporting Initiative (GRI) Standards, yaitu aspek ekonomi (GRI 200), lingkungan (GRI 300), dan sosial (GRI 400).

### **Hasil Evaluasi Umum Pelaporan Keberlanjutan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keberlanjutan perusahaan, ditemukan beberapa kondisi umum sebagai berikut:

1. Sebagian besar perusahaan telah menerbitkan laporan keberlanjutan secara terpisah maupun terintegrasi dengan laporan tahunan.
2. Struktur laporan umumnya telah mengacu pada pedoman Global Reporting Initiative (GRI).
3. Tingkat kelengkapan pengungkapan masih berbeda antarperusahaan.
4. Beberapa perusahaan telah menyertakan indeks GRI sebagai acuan pelaporan.
5. Tidak seluruh indikator GRI diungkapkan secara lengkap dan konsisten.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi pelaporan keberlanjutan masih berada pada tahap pengembangan. Perusahaan telah berupaya menerapkan standar global, namun kualitas dan kedalaman informasi yang diungkapkan masih beragam.

### **Evaluasi Aspek Ekonomi (GRI 200)**

Dalam GRI Standards, aspek ekonomi digunakan untuk mengevaluasi dampak ekonomi yang dihasilkan perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Adapun indikator yang digunakan meliputi:

1. GRI 201: Kinerja Ekonomi (Economic Performance)
  - a. Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan.
  - b. Implikasi keuangan akibat perubahan iklim.
  - c. Kewajiban program pensiun.
2. GRI 202: Keberadaan Pasar (Market Presence)
  - a. Perbandingan upah karyawan dengan upah minimum setempat.
  - b. Proporsi manajemen senior yang direkrut dari masyarakat lokal.
3. GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung (Indirect Economic Impacts)
  - a. Investasi infrastruktur dan layanan publik.
  - b. Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan.
4. GRI 204: Praktik Pengadaan (Procurement Practices)
  - a. Penggunaan pemasok lokal dalam kegiatan pengadaan.



5. GRI 205: Anti Korupsi (Anti-Corruption)
  - a. Penilaian risiko korupsi.
  - b. Pelatihan anti korupsi.
  - c. Tindakan terhadap kasus korupsi.
6. GRI 206: Perilaku Anti Persaingan (Anti-Competitive Behavior)
  - a. Kasus hukum terkait persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan hasil evaluasi, aspek ekonomi merupakan aspek yang paling banyak dan paling konsisten diungkapkan oleh perusahaan. Sebagian besar perusahaan telah menyajikan informasi mengenai kinerja ekonomi, distribusi nilai ekonomi, pembayaran pajak, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Pengungkapan indikator GRI 201 dan GRI 202 umumnya telah dilakukan dengan baik karena data yang diperlukan tersedia dalam sistem pelaporan keuangan perusahaan.

Namun demikian, pengungkapan pada indikator GRI 203, GRI 205, dan GRI 206 masih relatif terbatas. Tidak semua perusahaan menjelaskan dampak ekonomi tidak langsung yang dihasilkan, program anti korupsi yang dijalankan, maupun kasus terkait persaingan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih berfokus pada informasi ekonomi yang bersifat finansial dibandingkan dampak ekonomi yang lebih luas.

### **Evaluasi Aspek Lingkungan (GRI 300)**

Aspek lingkungan dalam GRI Standards digunakan untuk mengevaluasi dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan hidup. Indikator yang digunakan meliputi:

1. GRI 301: Material
  - a. Penggunaan bahan baku.
  - b. Material daur ulang.
2. GRI 302: Energi
  - a. Konsumsi energi.
  - b. Efisiensi energi.
  - c. Pengurangan penggunaan energi.
3. GRI 303: Air dan Efluen
  - a. Penggunaan air.
  - b. Pengelolaan sumber daya air.
  - c. Pembuangan air limbah.
4. GRI 304: Keanekaragaman Hayati
  - a. Dampak operasional terhadap ekosistem.
  - b. Perlindungan keanekaragaman hayati.
5. GRI 305: Emisi
  - a. Emisi gas rumah kaca.
  - b. Pengurangan emisi.
  - c. Pengendalian polusi udara.
6. GRI 306: Limbah
  - a. Pengelolaan limbah.
  - b. Daur ulang limbah.



c. Pengurangan limbah.

7. GRI 307: Kepatuhan Lingkungan

a. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan umumnya telah mengungkapkan penggunaan energi, konsumsi air, dan pengelolaan limbah sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan. Pengungkapan pada indikator GRI 302, GRI 303, dan GRI 306 relatif lebih banyak ditemukan dibandingkan indikator lainnya. Meskipun demikian, pengungkapan terkait emisi gas rumah kaca (GRI 305) dan keanekaragaman hayati (GRI 304) masih terbatas. Sebagian perusahaan hanya menyampaikan informasi secara umum tanpa menyajikan data kuantitatif yang memadai. Selain itu, konsistensi pelaporan antarperiode masih menjadi tantangan sehingga menyulitkan proses perbandingan kinerja lingkungan dari waktu ke waktu.

### Evaluasi Aspek Sosial (GRI 400)

Aspek sosial dalam GRI Standards digunakan untuk mengevaluasi hubungan perusahaan dengan tenaga kerja, masyarakat, dan pihak-pihak yang terdampak oleh aktivitas perusahaan. Indikator yang digunakan meliputi:

1. GRI 401: Ketenagakerjaan.
2. GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja.
3. GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
4. GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan.
5. GRI 405: Keberagaman dan Kesetaraan Kesempatan.
6. GRI 406: Non-Diskriminasi.
7. GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama.
8. GRI 408: Pekerja Anak.
9. GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja.
10. GRI 410: Praktik Keamanan.
11. GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat.
12. GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia.
13. GRI 413: Masyarakat Lokal.
14. GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok.
15. GRI 415: Kebijakan Publik.
16. GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan.
17. GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan.
18. GRI 418: Privasi Pelanggan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa perusahaan cenderung lebih fokus mengungkapkan indikator yang berkaitan dengan tenaga kerja, keselamatan kerja, serta program tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan pada GRI 401, GRI 403, dan GRI 404 merupakan indikator yang paling sering ditemukan dalam laporan keberlanjutan. Sebaliknya, indikator yang berkaitan dengan hak asasi manusia, keberagaman, masyarakat adat, serta privasi pelanggan masih belum diungkapkan secara optimal oleh sebagian perusahaan. Informasi yang disajikan juga cenderung bersifat naratif dan belum didukung oleh ukuran kuantitatif yang memadai. Hal ini menunjukkan



bahwa pelaporan sosial masih lebih berorientasi pada penyampaian aktivitas dibandingkan pengukuran kinerja sosial secara terstruktur.

### **Analisis Kesesuaian dengan Standar Global**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan telah mengadopsi GRI Standards sebagai pedoman pelaporan keberlanjutan. Namun demikian, tingkat kesesuaian antarperusahaan masih bervariasi. Aspek ekonomi menunjukkan tingkat pengungkapan yang relatif lebih baik dibandingkan aspek lingkungan dan sosial. Sementara itu, pengungkapan pada indikator lingkungan dan sosial masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait kelengkapan data, konsistensi pelaporan, dan penggunaan indikator kuantitatif.

Temuan penelitian ini mendukung Stakeholder Theory (Freeman, 1984) yang menjelaskan pentingnya penyediaan informasi kepada para pemangku kepentingan serta Legitimacy Theory (Deegan, 2002) yang menekankan bahwa perusahaan berusaha memperoleh legitimasi melalui pengungkapan informasi keberlanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan menjadi penting agar informasi yang disajikan tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga mampu menggambarkan kinerja keberlanjutan perusahaan secara komprehensif. Ini sudah jauh lebih kuat daripada versi awalmu karena setiap aspek sekarang memiliki indikator GRI yang jelas, lalu baru diikuti pembahasan hasil evaluasinya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pelaporan keberlanjutan pada perusahaan publik telah menunjukkan upaya penerapan Global Reporting Initiative (GRI) Standards sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Namun, tingkat kesesuaian pengungkapan masih bervariasi pada setiap aspek yang dievaluasi, yaitu aspek ekonomi (GRI 200), lingkungan (GRI 300), dan sosial (GRI 400).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aspek ekonomi memiliki tingkat pengungkapan yang relatif lebih baik dibandingkan aspek lainnya. Sebagian besar perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai kinerja ekonomi, keberadaan pasar, serta distribusi nilai ekonomi yang dihasilkan. Meskipun demikian, pengungkapan terkait dampak ekonomi tidak langsung, anti korupsi, dan perilaku anti persaingan masih belum dilakukan secara optimal oleh seluruh perusahaan.

Pada aspek lingkungan, perusahaan umumnya telah mengungkapkan informasi mengenai penggunaan energi, konsumsi air, dan pengelolaan limbah. Namun, pengungkapan terkait emisi gas rumah kaca, keanekaragaman hayati, serta kepatuhan lingkungan masih menunjukkan keterbatasan baik dari segi kelengkapan maupun konsistensi data yang disajikan. Sementara itu, pada aspek sosial, pengungkapan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta program tanggung jawab sosial perusahaan relatif lebih baik dibandingkan indikator lain seperti hak asasi manusia, keberagaman, masyarakat adat, dan privasi pelanggan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GRI Standards pada perusahaan publik masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencakup seluruh indikator yang direkomendasikan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kualitas, konsistensi, dan kelengkapan pengungkapan informasi keberlanjutan agar laporan yang dihasilkan tidak hanya



memenuhi kebutuhan regulasi, tetapi juga mampu memberikan informasi yang lebih transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Block, P. (1993). *Stewardship: Choosing service over self-interest*. Berrett-Koehler Publishers.
- Bursa Efek Indonesia. (2022). *Laporan tahunan perusahaan tercatat*. <https://www.idx.co.id>
- Deegan, Craig. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures – A theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311.
- Elkington, John. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing.
- Freeman, R. Edward. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman Publishing.
- Global Reporting Initiative. (2021). *GRI standards*. <https://www.globalreporting.org>
- Gray, Rob., Kouhy, Reza., & Lavers, Simon. (1995). Corporate social and environmental reporting: A review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47–77.
- International Integrated Reporting Council. (2013). *The international <IR> framework*. <https://www.integratedreporting.org>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- KPMG. (2020). *The time has come: The KPMG survey of sustainability reporting 2020*. <https://home.kpmg>
- Lembaga Alkitab Indonesia. (1974). *Alkitab: Terjemahan Baru*. Lembaga Alkitab Indonesia.
- Mahlel, M., Ridwan, & Nasirwan. (2016). Akuntabilitas dan transparansi berbasis bagi hasil (Analisis terhadap karyawan toko di Kota Beureunuen). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (J-EBIS)*, 2(2), 1–14.
- OECD. (2011). *OECD guidelines for multinational enterprises*. <https://www.oecd.org>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. <https://sdgs.un.org>